

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PINRANG**

**DARMAWAN  
10573 03624 12**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2017**

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN PINRANG**

Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

Disusun dan Diajukan Oleh  
**DARMAWAN**  
Nomor Stambuk : 10573 03624 12

Kepada

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIAH MAKASSAR**  
**MAKASSAR**  
**2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : **DARMAWAN**  
Stambuk : **105730362412**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**  
Dengan Judul : **Analisis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia Penguji Skripsi Srata 1 (S1) pada hari Sabtu, 24 Februari 2018 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 2018

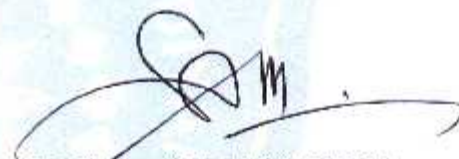
Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Ek. Muhammad. Ikram Idrus. MS



Abd. Salam. SE., M.Si, AK, CA

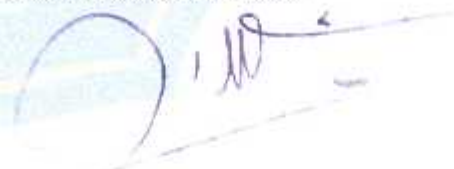
Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akutansi



Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM : 903078




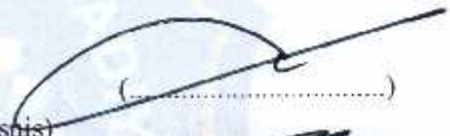





Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak., CA  
NBM : 1073428

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama Darmawan, Nim 105730362412. Ini Telah Diperiksa Dan Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar No.....,2018 M Dan Telah Dipertahankan Didepan Penguji Pada Hari Sabtu 24 Februari 2018 M Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar 08 jamadil akhir 1439 H  
24 Februari 2018

### Panitia Ujian :

1. Pengawas Ujian : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM  
(Rektor Unismu Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR,SE.,MM  
(Wakil Dek. I Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
  - 1) Dr. Agus Salim H R, SE., MM. 
  - 2) Linda Arisanty Razak, SE., M.Si.,Ak 
  - 3) Faidul Adzim, SE., M.Si. 
  - 4) Dr. Andi Rustam,SE., MM.AK.CA 

## **MOTTO PERSEMBAHAN**

Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karna mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karna mereka lebih suka bekerja. mereka tidak menyia-nyikan waktu untuk menunggu Inspirasi.

*“Dan bahwasanya usaha itu kelah akan di perlihatkan (kepadanya).  
Kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”*

*(An-Najm, 40-41)*

## ABSTRAK

**DARMAWAN. 105730362412. Analisis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang.** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Drs.Ek.Muhammad.IkramIdrus.MS sebagai Pembimbing I dan Abd.Salam HB.SE.,M.Si,AK,CA sebagai Pembimbing II

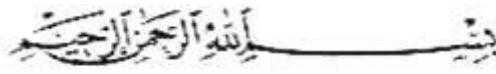
Penelitian ini bertujuan untuk Menilai Pengendalian dan Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Pinrang terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang (APBD) tahun Anggaran 2011 sampai dengan tahun Anggaran 2014.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan bersifat Deskriptif Komparatif. Data yang diolah adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun Anggaran 2011 sampai dengan tahun Anggaran 2014 yang di dapatkan dari BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Pinrang. Analisis yang digunakan untuk menganalisis Pengendalian Keuangan Daerah digunakan varians Anggaran sedangkan Analisis yang digunakan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah digunakan Analais Rasio .

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Analisis Pengendalian Keuangan Daerah dapat disimpulkan bahwa, pada Pengendalain Pemerintah Daerah dinilai baik karna Anggaran lebih besar di banding Realisasinya ditinjau dari Varians Anggaran Pendapatan dan Varians Anggaran Belanja. Dan berdasar kan hasil perhitungan Analisis Kinerja Keuangan Daerah dapat di simpulkan bahwa pola hubungan Tingkat Kemandirian Pemerintahan Kabupaten Pinrang secara umum dapat dikatakan baik dan cukup signifikan, Tingkat Efektivitas Pemerintah Kabupaten Pinrang di katakan sangat Efektif, Tingkat Efisiensi Pemerinta Daerah Kabupaten Pinrang dikatakan sangat Efisien, Tingkat Keresasian Belanja dikategorikan kurang efektif, dan Tingkat Derajat Desentralisasi juga dikategorikan kurang. Analisis pengendalian dan kinerja pemerintah kabupaten pinrang di kategorikan baik (efektif dan efisien) Karna Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tiap tahunnya mengalami peningkatan.

**Kata Kunci :** Analisis Pengendalian Dan Pengukuran Kinerja APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah)

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu prasyarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah meberikan petunjuknya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini tidak jarang menemui kesulitan namun berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak maka penulis mampu menyelesaikannya. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menghanturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H Abd Rahman Rahim,SE.,MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong,.SE MM Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi SE,.M.Si., Ak.CA Ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Drs. Muhammad Ikram Idrus .MM, Pembimbing I yang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan sejak penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Abd Salam SE,M.Si.Ak.CA , Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi sejak penulisan proposal hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf dan tata usaha di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kepala Kantor DPKD Kabupaten Pinrang beserta stafnya atas bantuan serta kerjasamanya selama penulis mengadakan penelitian.
8. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Tamrin dan Ibunda Patimang atas segala doa dan susah payahnya serta pengorbanan yang tak terhingga baik moral maupun materi yang diberikan semasa pendidikan hingga penyusunan Skripsi ini.
9. Teristimewa buat keluarga besar Saya yang selama banyak membantu semasa kuliah sampai saya menyelesaikan studi.
10. Spesial buat Mutmainna Haris yang selalu memberi support dan semangat dalam penyelesaian studi.
11. Teman-teman Akuntansi2 2012 dan Teman Teman angkatan 2012 tanpa terkecuali atas kebersamaanya, keceriaanya menjalani hari-hari perkuliahan selama ini, semoga persahabatan ini terjalin abadi dalam Ridho Allah SWT, Amiin.
12. Saudara-saudaraku di **Kerukunan Mahasiswa Pinrang** dan **Mahasiswa Pattinjo Pecinta alam**, yang selama ini banyak membantu dalam penyusunan skripsi.



13. Saudara- saudara saya yang ada di HMJ akuntansi yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini
14. Sahabat- sahabatku di **The legend of economy** yaitu ahmad yani ahmad irsal Noura Mandasri , Iis parastiwi, yang selama ini banyak membantu dalam pengurusan perkuliahan.
15. Serta untuk saudara seperjuangaku yang sangat membantuku selama ini Edi Mustari Tanpa bantuannya mungkin sampai sekarang saya belum bisa menyelesaikan skripsi ini. Makasih Bro

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, Oleh karena itu, segala bentuk dan saran, masukan, dan kritikan, dari semua pihak senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis menitipkan harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya kepada penulis.

Makassar , Maret 2017

Darmawan

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Keuangan Publik .....	5
B. Definisi Pengendalian Internal .....	6
C. Tujuan Pengendalian Internal.....	9
D. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).....	9
E. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	18
F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	20
G. Kerangka Fikir.....	27
H. Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	29
B. Metode Pengumpulan Data .....	29
C. Jenis Dan Sumber Data .....	30
D. Metode Analisis Data .....	31

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH	
A. Sejarah Kabupaten Pinrang .....	32
B. Kondisi Geografis Daerah.....	34
C. Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang .....	36
D. Visi Misi Pemerintahan Kabupaten Pinrang .....	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun....	43
B. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang.....	58
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
DAFTAR LAMPIRAN.....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir .....	28
2. Kondisi Geografis Daerah .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Pinrang Tahun 2014.....	36
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang.....	43
3. Rasio Kemandirian Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2012-2014 (Dalam Rupiah) .....	59
4. Rasio Indeks Kemampuan Rutin Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2012-2014 (Dalam Rupiah) .....	61
5. Rasio Keserasian Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2012-2014 (Dalam Rupiah) .....	64
6. Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2012-2014 (Dalam Rupiah) .....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Selama satu dekade terakhir, peran sistem pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah mendapat perhatian luas dari para auditor internal, auditor eksternal, penyusun laporan keuangan, asosiasi profesi, dan badan-badan legislatif serta para birokrat. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah banyaknya kejadian yang terkait dengan kegagalan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan pemerintahan (Abdullah, 2008). Di lingkungan pemerintah, salah satu permasalahan yang menjadi isu nasional adalah masalah penyerapan anggaran yang relatif rendah serta lambat oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor riil dan yang pada akhirnya akan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan menekan tingkat kemiskinan (Abdullah, 2008).

Dalam pelaksanaan kegiatan, instansi pemerintah dihadapkan pada ketidakpastian dalam menjalankan kegiatannya yang tentu saja akan berpengaruh pada efisiensi proses kegiatan tersebut, serta efektivitas hasilnya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu sistem pengendalian internal. Pengendalian internal diperlukan untuk meyakinkan bahwa sebagian besar ketidakpastian, baik dalam pengelolaan keuangan maupun kegiatan telah diperhitungkan pengaruhnya pada pencapaian hasil akhir kegiatan. Sistem

ini diharapkan dapat memberi keyakinan terhadap penyelenggara kegiatan pada suatu instansi pemerintah, sehingga dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, meningkatkan daya serap anggaran, serta dapat melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Hasmah, 2010).

Keberhasilan mengenali dan mengukur besaran ketidakpastian, baik yang melekat pada instansi pemerintah sampai kepada suatu kegiatan, akan memungkinkan instansi pemerintah untuk memilih berbagai aktivitas pengendalian dalam rangka pengelolaan kegiatan dan resiko, serta pemilihan metode pengelolaan yang tepat yang mampu meyakinkan dapat dikendalikan proses sehingga sumber daya yang telah dianggarkan dapat diserap dengan tepat waktu dan tepat guna (Abdullah, 2008).

Berubahnya sistem pengelolaan keuangan negara tidak hanya dalam hal penerapan penganggaran, namun juga dalam sistem pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara. Perubahan tersebut antara lain di bidang penganggaran keuangan negara, *linebased budgeting* diganti oleh *performance based budgeting* yaitu penganggaran yang didasarkan pada kinerja dan berorientasi pada hasil akhir. Di bidang pertanggungjawaban, pencatatan dan pelaporan, keuangan negara tidak lagi dicatat secara *single-entry* namun diubah berdasarkan kaidah standar akuntansi keuangan yang menerapkan pencatatan secara *double-entry* dan

disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap yaitu neraca, realisasi anggaran, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Abdullah, 2008)

Sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan memerlukan dukungan sistem pengelolaan keuangan instansi pemerintah secara keseluruhan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing mulai dari pembentukan struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat, penetapan sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, pelaksanaan praktik-praktek sehat dalam melakukan tugas, serta pemberian tanggung jawab sesuai dengan tingkat kecakapan pegawai.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui keterkaitan antara proses pengendalian internal terhadap daya serap anggaran, sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

## **B. Rumusan Masalah**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni, Apakah pengelolaan keuangan sektor publik dapat mendukung kinerja keuangan pemerintah Kab Pinrang.



### **C. Tujuan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan sektor publik dalam mendukung kinerja keuangan pemerintah Kab Pinrang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kab Pinrang mengelola Keuangan sektor publik dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya di bidang akuntansi.
2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang serupa

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Keuangan Publik**

Keuangan Publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan keuangan pemerintah. Sektor Keuangan Publik telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu secara dinamis. Sektor Keuangan Publik mempelajari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, karena setiap keputusan pemerintah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegiatan perekonomian. Untuk itu sangatlah penting bagi semua pihak untuk mengembangkan konsep-konsep dasar pengelolaan keuangan publik agar dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh fungsi manajemen keuangan negara dan daerah termasuk fungsi pengawasan. Konsep tersebut mencakup pula semua nilai-nilai perubahan yang terdapat pada reformasi manajemen keuangan negara dan daerah. Hasil dari reformasi keuangan negara dan daerah tersebut antara lain adalah lahirnya paket undang-undang di bidang otonomi daerah.

Disamping itu terjadi pula perubahan yang mendasar di bidang pemeriksaan dan pengawasan yang antara lain berupa penguatan atas keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keberadaan BPK yang makin kuat disamping keberadaan pengawas intern yang makin kokoh akan menjamin terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan yang makin intensif yang pada gilirannya akan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang makin tertib.

## B. Definisi pengendalian internal

Sistem pengendalian intern merupakan istilah yang telah umum dan banyak digunakan dalam berbagai kepentingan. Istilah pengendalian internal diambil dari terjemahan istilah "*Internal Control*", meskipun demikian penulis menterjemahkan sebagai pengawasan internal. Sistem pengendalian internal dipandang sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting yang dipahami sebagai usaha untuk mengarahkan dapat dicapainya tujuan organisasi. Pengertian Sistem Pengendalian Internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah : "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Dengan pengertian tersebut, secara umum sistem pengendalian internal diartikan sebagai rangkaian kegiatan, prosedur, proses, dan aspek lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan penciptaan pengendalian internal. Dalam perkembangannya, terjadi pergeseran karakter pengendalian yang tidak hanya mencakup rangkaian kegiatan dan prosedur, namun suatu proses yang integral yang dipengaruhi oleh setiap orang di dalam organisasi sebagai upaya manajemen organisasi mengantisipasi ketidakpastian dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Karakter pengendalian internal bergeser dari *hard control* menuju *soft control*. Hal ini ditandai dengan peningkatan produktivitas,

efisiensi dan efektivitas tidak hanya melalui prosedur dan mekanisme pengendalian tetapi juga dengan meningkatkan kompetensi, kepercayaan, nilai etika dan penyatuan pandangan atas visi, misi dan strategi organisasi.

Dikemukakan pula oleh Committee on Auditing Procedure American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) adalah: Pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivasinya, mengecek kecermatan dan keandalan dari data akuntansinya, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan pimpinan (James, 1997: 155).

Kemudian Hartanto (1997:51) memberikan penjelasan tentang pengendalian internal dengan membedakan ke dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pengendalian internal disamakan dengan "*Internal Check*" yang merupakan prosedur-prosedur mekanisme untuk memeriksa ketelitian dari data administrasi, seperti mencocokkan penjumlahan horizontal dengan penjumlahan vertikal; Dalam arti luas, pengendalian intern dapat disamakan dengan "*Management Control*", yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi/ mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian pengendalian internal meliputi : struktur organisasi, formulir-formulir dan prosedur pembukuan dan laporan (administrasi), anggaran dan standar pemeriksaan internal dan sebagainya. (Hartanto, 1997: 51).

Sedangkan Baridwan (1998: 97) mengartikan pengendalian internal sebagai berikut : Pengendalian internal meliputi rencana organisasi dan metode serta kebijaksanaan yang terkoordinir dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan dan sampai seberapa jauh data akuntansi dapat dipercayai, menggalakkan efisiensi usaha dan dapat mendorong ditaatinya kebijaksanaan pimpinan yang telah digaris bawahi.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), pengendalian internal didefinisikan sebagai berikut: Sistem pengendalian internal meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.

Pengendalian internal dalam arti luas seringkali disamakan dengan *management control*. Selanjutnya unsur-unsur yang terdapat pada sistem pengendalian internal dikelompokkan menjadi dua sub sistem, yaitu sub sistem pengendalian administrasi (*administrative control*) dan pengendalian akuntansi (*accounting control*). Jadi dalam arti yang luas, sistem pengendalian internal mencakup pengendalian yang dibedakan atas pengendalian internal yang bersifat *accounting* dan administrasi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 1998: 23).

Dari keempat definisi yang diungkapkan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa, sistem pengendalian internal merupakan suatu “sistem” yang terdiri dari berbagai macam unsur dengan tujuan untuk melindungi harta

benda, meneliti ketetapan dan seberapa jauh dapat dipercayai data akuntansi, mendorong efisien operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan.

### **C. Tujuan Pengendalian Internal**

Pengendalian internal yang diciptakan dalam suatu perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan. Sesuai dengan definisi yang dikemukakan AICPA tersebut di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari pengendalian internal yaitu menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi operasi perusahaan, dan membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih (Zaki, 1999: 14).

### **D. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

#### **1. Pengertian SPIP**

Sistem pengendalian internal dipandang sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting dipahami sebagai usaha untuk mengarahkan dapat dicapainya tujuan organisasi. Pengertian sistem pengendalian internal menurut PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP adalah : “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Dengan pengertian tersebut, secara umum sistem pengendalian internal diartikan sebagai rangkaian kegiatan, prosedur, proses, dan aspek lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan penciptaan pengendalian internal.

## **2. Unsur-unsur SPIP**

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 (hal 4, pasal 3), SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian resiko,
3. Kegiatan pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi, dan
5. Pemantauan pengendalian internal.

Kelima unsur pengendalian internal tersebut merupakan suatu unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari lingkungan pengendalian adalah SDM di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah (Widayadi, 2008).

## **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian internal dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Pimpinan dan pegawai instansi pemerintah perlu memiliki sikap perilaku yang positif, mendukung pengendalian internal, dan memiliki manajemen yang bersih. Pimpinan harus menyampaikan pesan bahwa nilai-nilai integritas dan etis tidak boleh dikompromikan. Pimpinan juga harus menunjukkan suatu komitmen terhadap kompetensi/kemampuan pegawai serta menggunakan kebijakan dan praktik yang baik atas pembinaan sumber daya manusia. Pimpinan juga harus memiliki kepemimpinan yang kondusif guna mendukung pengendalian internal yang efektif. Di samping itu, instansi pemerintah juga harus memiliki struktur organisasi dan metode pen dele gasian wewenang dan tanggung jawab yang dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap efektifitas pengendalian internal. Serta harus memiliki hubungan kerja yang baik dengan badan legislatif serta auditor internal dan eksternal. (Soeseno, 2009:11)

Fondasi dari sistem pengendalian adalah orang-orang di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Penerapan lingkungan pengendalian yang baik dalam rangka peningkatan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai serta menjadi komitmen



bersama dalam melaksanakannya, sangatlah penting untuk terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya (Widayadi, 2008).

Lingkungan pengendalian dibentuk oleh perilaku dari orang-orang di dalam organisasi yang mendukung pengendalian internal dan memengaruhi kesadaran mereka akan pentingnya pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini dihasilkan dari tata kelola (*governance*) yang dilakukan manajemen, yang terdiri dari: filosofi, gaya dan perilaku yang mendukung, kompetensi, nilai etika, integritas dan moral keseluruhan orang di dalam organisasi. Lingkungan pengendalian selanjutnya dipengaruhi oleh hubungan-hubungan dari struktur dan akuntabilitasnya di organisasi (Widayadi, 2008).

Lingkungan pengendalian berpengaruh kuat terhadap keputusan dan kegiatan di dalam organisasi, dan menjadi fondasi bagi seluruh unsur lain dari sistem pengendalian internal. Jika fondasi ini tidak kuat, atau lingkungan pengendaliannya tidak positif, maka seluruh sistem pengendalian internal tidak akan berjalan efektif seperti yang diharapkan. Lingkungan pengendalian mempunyai pengaruh kuat terhadap cara-cara aktivitas organisasi distrukturkan, penetapan tujuan dan sasaran dan penaksiran/penilaian resiko. Lingkungan pengendalian memengaruhi aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pengaruh tersebut tidak hanya pada desainnya, tetapi juga terhadap cara mereka bekerja dari hari ke hari.

Lingkungan pengendalian itu juga memengaruhi kesadaran dari orang-orang yang menjadi anggota organisasi akan pengendalian (Widayadi, 2008). Aktivitas pengendalian yang efektif berupaya kuat untuk memiliki orang-orang yang kompeten, yang mempunyai integritas terhadap keseluruhan organisasi dan kesadaran akan pengendalian, serta membangun suatu "tinggi" yang positif. Mereka menetapkan kebijakan dan prosedur-prosedur, seringkali termasuk kode etik tertulis, yang mendorong nilai-nilai bersama dan tim kerja dalam rangka mencapai tujuan instansi pemerintah (Widayadi, 2008).

## **2. Penilaian Resiko**

Unsur kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, yang meliputi identifikasi dan kegiatan analisis risiko. Selain dipengaruhi risiko, keberhasilan pencapaian tujuan instansi pemerintah dipengaruhi pula oleh kecermatan dalam proses penetapan tujuan. Oleh karena itu, dalam unsur kedua ini, diuraikan pula ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses penetapan tujuan instansi pemerintah (Widayadi, 2008).

Pertama-tama, pimpinan harus menetapkan tujuan yang jelas dan konsisten baik untuk tingkatan instansi maupun untuk tingkatan pendukungnya. Setelah itu, dilakukan identifikasi risiko secara menyeluruh, baik risiko dari sumber internal maupun eksternal, yang dapat

mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya. Setelah resiko-resiko teridentifikasi, instansi pemerintah perlu melakukan analisis resiko dan mengembangkan pendekatan yang memadai untuk mengelola resiko-resiko tersebut. Selain itu, dalam penilaian resiko diperlukan suatu mekanisme untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah tersebut dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya (2008).

### **3. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain suatu organisasi memerlukan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan tercapai (Soeseno, 2009:12).

Untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme pengendalian yang memadai dan dapat diterapkan untuk setiap kegiatan sebagaimana mestinya. Kegiatan pengendalian harus dikembangkan pada kegiatan pokok instansi pemerintah dan didasarkan pada hasil penilaian risiko yang telah dilakukan. Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dikembangkan untuk meminimalkan risiko sehingga membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi

pemerintah dapat dicapai. Instansi pemerintah dapat menerapkan kategori kegiatan pengendalian yang relevan dan dipandang tepat untuk meminimalkan risiko. Bukan merupakan keharusan bahwa keseluruhan kategori (sub unsur) kegiatan pengendalian harus diterapkan untuk satu risiko tertentu. Instansi pemerintah diberikan keleluasaan (diskresi) untuk menentukan kegiatan pengendalian yang tepat (Widayadi, 2008). Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pengendalian adalah sebagai berikut:

1. Semua tujuan yang relevan dan risiko untuk masing-masing penting sudah diidentifikasi pada saat penilaian risiko.
2. Pimpinan instansi pemerintah telah mengidentifikasi tindakan dan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk menangani risiko tersebut dan memberikan arahan penerapannya (Widayadi, 2008).

Kegiatan pengendalian yang teridentifikasi tersebut harus diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

1. Kegiatan pengendalian yang diatur dalam pedoman pelaksanaan kebijakan dan prosedur sudah diterapkan dengan tepat dan memadai
2. Pegawai dan atasannya memahami tujuan dari kegiatan tersebut
3. Petugas pengawas mereviu berfungsinya kegiatan pengendalian sudah ditetapkan dan selalu waspada terhadap adanya kegiatan pengendalian yang berlebihan

4. Terhadap penyimpangan, masalah dalam penerapan, atau informasi yang membutuhkan tindak lanjut, telah diambil tindakan secara tepat waktu (Widayadi, 2008).

#### **4. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi penting bagi pengendalian yang efektif, informasi tentang rencana organisasi, lingkungan pengendalian, risiko, kegiatan pengendalian, dan kinerja harus dikomunikasikan ke atas, ke bawah dan seluruh organisasi. Keandalan dan relevansi informasi baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar harus diidentifikasi, ditangkap, diproses, dan dikomunikasikan kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk dan jangka waktu tertentu sehingga bermanfaat. Sistem informasi menghasilkan laporan yang berisi informasi yang berhubungan dengan operasi, keuangan, dan ketaatan sehingga memungkinkan untuk menjalankan dan mengendalikan organisasi (Widayadi, 2008).

Sistem informasi dan komunikasi dapat bersifat formal maupun informal. Sistem informasi dan komunikasi formal yang dapat berupa dari teknologi informasi yang canggih sampai dengan pertemuan staf yang sederhana harus dapat menyediakan data masukan dan umpan balik yang berhubungan dengan tujuan operasi, laporan keuangan dan ketaatan. Sistem tersebut vital bagi keberhasilan organisasi. Sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang dalam organisasi untuk mendapatkan dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan,

dan mengendalikan kegiatan operasi. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus memperoleh informasi untuk diolah dan disampaikan kepada pimpinan instansi dan pihak-pihak lain yang memerlukan. Informasi tersebut harus relevan dan dapat diandalkan serta disajikan kepada pihak yang tepat secara tepat isi dan tepat waktu, sehingga memungkinkan bersangkutan melaksanakan pengendalian internal dan tanggung jawab operasionalnya (Widayadi, 2008).

## **5. Pemantauan Pengendalian Internal**

Pemantauan pengendalian internal adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal dalam suatu periode tertentu. Hal ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian internal pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan (Soeseno, 2009:14).

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit, dan review lainnya. Pemantauan pengendalian intern berkelanjutan berada pada setiap orang dalam instansi pemerintah sesuai dengan lingkup kerjanya. Kedudukan seseorang dalam organisasi membantunya menentukan fokus dan sejauh mana tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh pegawai/staf,

penyelia, pimpinan menengah dan pimpinan tinggi tidak akan samafokusnya (Widayadi, 2008).

## **E. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

### **1. Pengertian Kinerja Keuangan**

Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. „Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien“ (Mardiasmo 2002:121).

Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan *output/ input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. „Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*“ (Mardiasmo, 2002: 4). Adapun arti dari penilaian kinerja menurut Mardiasmo (2002:28) „yaitu penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, karyawan berdasarkan

asaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.”” Dan menurut keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Sedangkan menurut Mahmudin (2006 : 25) “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang teruang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Disamping itu, menurut Sedarmayanti (2003 : 64) “Kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan standar yang telah ditentukan”. Faktor kemampuan sumber daya aparatur pemerintah terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan *ability (knowledge + skill)*, sedangkan faktor motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) sumber daya aparatur pemerintah dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan sumber daya aparatur pemerintah dengan terarah untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu *good governance*.



Dalam penelitian ini, istilah yang penulis maksudkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa Perhitungan APBD.

## **F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

### **1. Pengertian Anggaran**

Proses penyusunan anggaran sering kali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Pidato Presiden setiap bulan Agustus tentang Nota Keuangan dan Rancangan APBD, misalnya, selalu menjadi indikator perekonomian Negara untuk selama setahun berikutnya. Bahkan, tidak jarang APBD tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak oposisi. Jika demikian, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan anggaran? Bagaimana seluk-beluknya? Menurut Mardiasmo (2002), „Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*)”. Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi sektor publik tentunya berkeinginan

memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Disinilah dituntut peran penting anggaran. Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.

Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil. Mardismo (2002:61) menyatakan bahwa „Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran“.

Sedangkan menurut Bastian (2006:164) „mengutip dari *National Committee on Governmental Accounting (NCGA)*, yaitu rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatannya yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.“ Anggaran merupakan dokumen yang berisi angka-angka yang diprediksikan akan diperoleh dan akan digunakan untuk satu jangka waktu tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu instrumen yang menggambarkan kebijakan manajemen yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang dibuat secara sistematis dan

terencana dengan mengintegrasikan dan mengalokasikan seluruh sumber daya (*resources*) ke dalam berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai kinerja yang diharapkan pada suatu masa tertentu.

Sedangkan Anggaran menurut Suparmoko (2002) merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) dimasa yang akan datang, dan juga merupakan alat kontrol atau pengawasan baik terhadap pengeluaran maupun pendapatan dimasa yang akan datang. Untuk menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akurat, diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu anggaran. Selain sebagai alat ukur dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah, sistem anggaran yang dikembangkan oleh pemerintah berfungsi sebagai pengendali keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, pertanggungjawaban kepada publik. Terkait dengan rencana manajemen, sistem anggaran berfungsi sebagai suatu metode anggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan di mana manfaat tersebut dideskripsikan melalui seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Untuk mengidentifikasi keterkaitan biaya dengan manfaat serta keterkaitan antara nilai uang dan hasil di tingkat pemerintahan daerah, pemda menuangkan anggaran tersebut dalam suatu rencana keuangan

yang dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran sektor publik menggambarkan kegiatan pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai stakeholder. Oleh sebab itu setiap anggaran publik harus berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan implementor serta meningkatkan wibawa pemerintah.

Anggaran menjadi sangat esensial dalam upaya menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemerintah dengan melibatkan masyarakat. Penyusunan anggaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima secara umum

Menurut Yuwono (2002: 85) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **2. Fungsi APBD**

Mardiasmo (2002:63) mengungkapkan ada beberapa fungsi utama dari adanya anggaran sektor publik, yaitu :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)
4. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination & Communication*)

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)
7. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)
8. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik (*Publik Sphere*).

Menurut Permendagri No.13/2006 pasal 16, APBD memiliki fungsi berikut :

Otorisasi; anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja pada tahun yang bersangkutan

1. Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
2. Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan ditetapkan
3. Alokasi; anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta efisiensi dan efektifitas perekonomian
4. Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepanutan
5. Stabilisasi; anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

### **3. Struktur APBD**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **1. Pendapatan daerah**

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

#### **2. Belanja daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta

jenis belanja. Sedangkan, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

### **3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

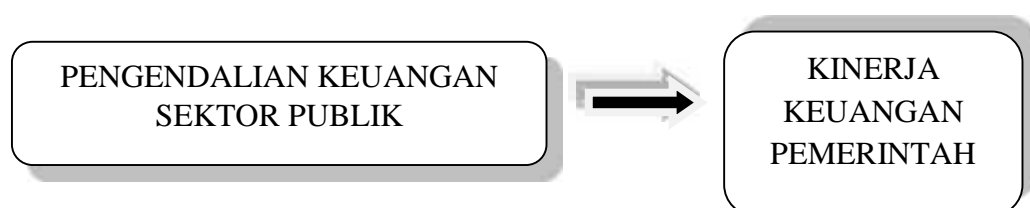
Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari : Penerimaan Pembiayaan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 60 menyebutkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah,

meliputi: sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjamdaerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaankembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

### G. Kerangka Pikir

Selayaknya dalam setiap program pemerintah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian disertai dengan proses pengendalian internal sehingga dapat mencapai tujuannyasecara efisien dan efektif. Evaluasi program kerja pemerintah, dalam hal inipenilaian akan kinerja keuangan dalam hal efektifitas dan efesiensi pelaksanaankegiatan dapat tercermin dari tingkat daya serap anggaran kegiatan tersebut. Daya serap anggaran itu sendiri, dapat dipengaruhi secara baik secaralangsung ataupun tidak langsung dari pelaksanaan proses pengendalian internal.

Berdasarkan telaah teoritis di atas, maka model penelitian atau kerangka pemikiran yang menggambarkan pengaruh lingkungan pengendalian, penilaianresiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauanpengendalian intern terhadap daya serap APBD digambarkan dalam skemaberikut : Skema 1. Kerangka Pikir





## **H. Hipotesis**

Diduga bahwa pengelolaan keuangan sektor publik telah dilaksanakan secara efektif dalam menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah kab Pinrang

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Pinrang, dengan ruang lingkup penelitian adalah pegawai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dilakukan selama 2 bulan .

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dimaksudkan memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner
2. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden dengan maksud memperoleh data yang akurat dan *valid*.
3. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*)
4. Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan. *Library research* merupakan dokumentasi tinjauan menyeluruh terhadap karya publikasi dan non-publikasi dari sumber sekunder dalam bidang minat khusus bagi peneliti (Sekaran, 2006: 21).

5. Mengakses *Website* dan Situs-Situs
6. Metode ini digunakan untuk mencari *website* maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.

### C. Jenis dan sumber data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber lokasi penelitian atau sumber asli tanpa melalui pihak perantara. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner yang dibagikan kepada pegawai-pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang dipublikasikan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tinjauan kepustakaan (*library research*) dan mengakses *website* maupun situs-situs.

### D. Metode Analisis Data

#### 1. Deskriptif Kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Teknik pengumpulan data kualitatif diantaranya adalah *interview* (wawancara), *quesionere* (pertanyaan-pertanyaan/kuesioner), *schedules* (daftar pertanyaan), dan observasi (pengamatan, *participant observer technique*), penyelidikan sejarah hidup (*life historical investigation*), dan analisis konten (*content analysis*).

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAERAH

#### A. Sejarah Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang keberadaannya dalam konteks sejarah dimulai dari suatu peristiwa di Sawitto pada masa pemerintahan La Paleteang, Raja IV Kerajaan Sawitto, sekitar tahun 1540. Dimana pada waktu itu terjadi peperangan antara Kerajaan Sawitto dan Kerajaan Gowa. Perang ini terjadi karena Gowa sebagai kerajaan besar, berusaha untuk menguasai Kerajaan Sawitto yang kondisi dan potensinya menjanjikan setumpuk harapan. Perang ini berakhir dengan kekalahan di pihak Kerajaan Sawitto sehingga raja La Paleteang dan permaisurinya dibawa ke Gowa sebagai tanda kemenangan Kerajaan Gowa atas Kerajaan Sawitto.

Masyarakat Kerajaan Sawitto berupaya untuk membebaskan raja La Paleteang dan permaisurinya. Untuk itu, dalam suatu musyawarah kerajaan terpilihah dua Tobarani (Pemberani) yaitu To lengo dan To Kipa untuk mengemban tugas membebaskan sang raja beserta permaisurinya. Kemudian berangkatlah kedua bersaudara tersebut ke kerajaan Gowa dan berhasil membawa pulang raja "La Paleteang" beserta permaisurinya. Kedatangan raja bersama permaisuri, disambut dengan luapan kegembiraan dan di elu-elukan sepanjang jalan menuju istana. dibalik kegembiraan itu, mereka terharu melihat kondisi sang raja yang mengalami banyak perubahan seraya mengatakan "*Pinra Kana Ni Tappa Na Datue Pole Ri Gowa*" Yang artinya wajah raja berubah sekembalinya dari Gowa. Kata-kata inilah

senantiasa terlontar dari orang-orang yang menyertai sang raja. Ketika raja beristirahat sejenak sebelum tiba di istana bertitahlah sang raja kepada pengantarnya untuk menyebut tempat tersebut dengan nama Pinra.

Sumber lain menyebutkan bahwa Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata "*benrang*" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti "rawa-rawa". Hal ini disebabkan pada awal pembukaan, daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa-rawa. Adapula yang mengatakan bahwa akibat pemukiman kota Pinrang berupa rawa-rawa dan selalu tergenang air itulah yang membuat masyarakat senantiasa berpindah-pindah mencari wilayah pemukiman yang bebas genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman, dalam bahasa bugis disebut "*Pinra-Pinra Onroang*" setelah masyarakat menemukan tempat pemukiman yang baik, maka diberinya tempat tersebut *Pinra-Pinra*.

Dari kedua sejarah yang berbeda itu lahirlah istilah yang sama yaitu "*Pinra*" kemudian kata itu dalam perkembangannya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa bugis sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini diabadikan menjadi Kabupaten Pinrang.

Pada masa Pemerintahan kolonial, Kabupaten Pinrang berbentuk *Onder Afdeling* Pinrang yang berada di bawah *afdeling* Pare-Pare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi *self bestuur* atau swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto dan Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi. kerajaan *Massenrengpulu* (Kassa dan Batulappa). Dan *Ajatappareng* (Suppa dan Sawitto). Selanjutnya *Onder Afdeling* Pinrang

pada zaman pendudukan Jepang menjadi *Bunken Kanrikan* Pinrang dan pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang.

Pada tahun 1952 terjadi perubahan daerah di Sulawesi Selatan, pembagian wilayahnya menjadi daerah swatantra. Daerah swatantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah *afdeling*. Perubahan adalah kata *afdeling* menjadi swatantra dan *Onder Afdeling* menjadi kewedanaan. Dengan perubahan tersebut maka *Onder Afdeling* Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang yang membawahi empat swapraja dan beberapa distrik.

Pada tahun 1959 keluarlah undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang. Pada tanggal 28 Januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 yang menunjuk H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi maka tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal berdirinya Kabupaten Pinrang.

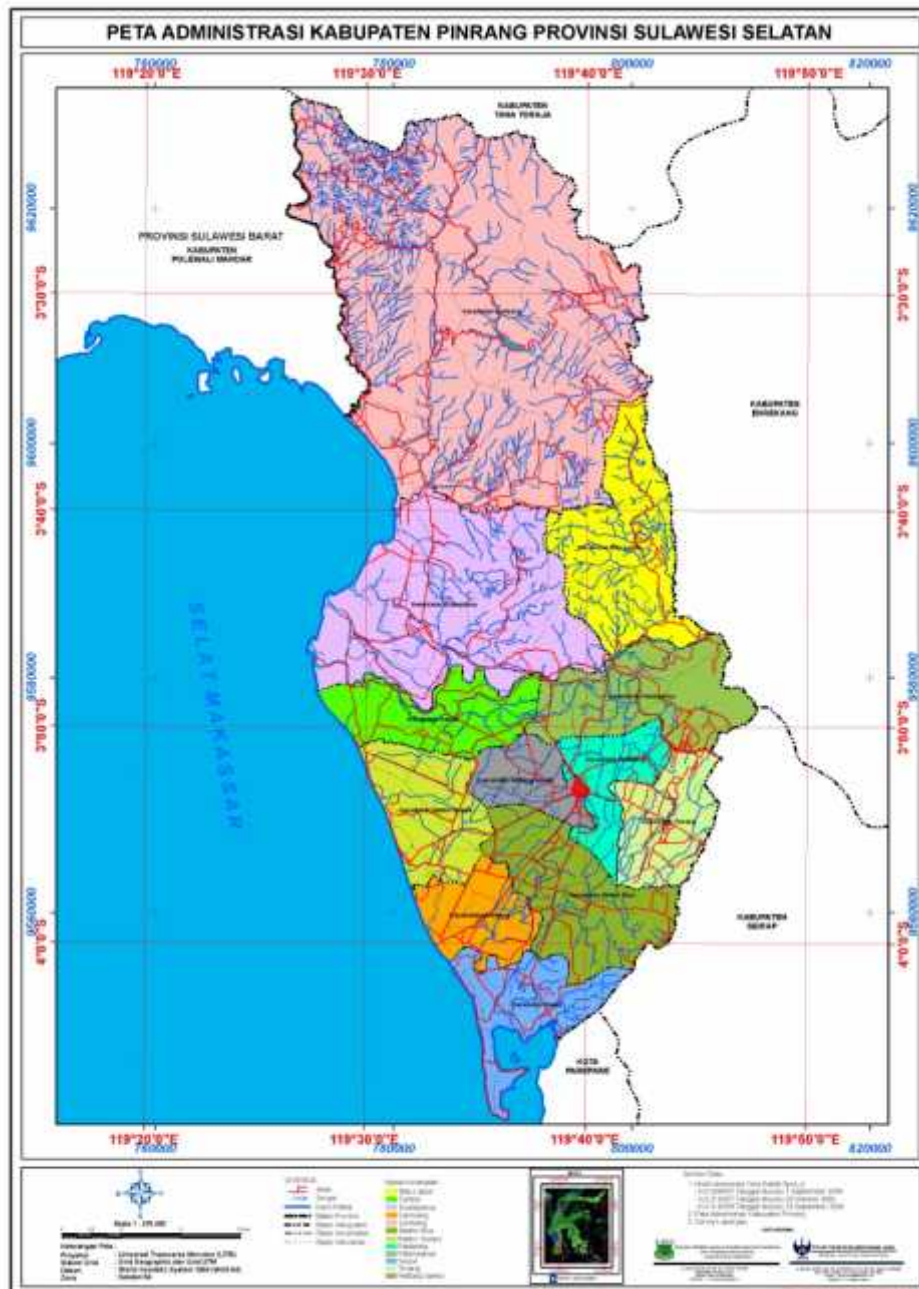
## **B. Kondisi Geografis Daerah**

### **1. Batas Administrasi**

Kabupaten Pinrang terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap

- c) Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare



Gambar 2. Kondisi Geografis Daerah



Secara Administrasi, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 Kecamatan, 39 Kelurahan dan 69 Desa yang meliputi 96 Lingkungan dan 181 Dusun. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan Kabupaten Pinrang Tahun 2014

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Lingkungan	Dusun
1	Suppa	2	8	5	22
2	Mattiro Sompe	2	7	4	19
3	Lanrisang	1	6	3	16
4	Mattiro Bulu	2	7	6	19
5	Watang sawitto	8	-	17	-
6	Paleteang	6	-	14	-
7	Tiroang	5	-	13	-
8	Patampanua	4	7	13	19
9	Cempa	1	6	2	15
10	Duampanua	5	10	10	27
11	Batulappa	1	4	4	11
12	Lembang	2	14	5	41
<b>TOTAL</b>		39	69	96	181

Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2014

### C. Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, Kabupaten Pinrang dipimpin oleh seorang Bupati yang merupakan hasil pemilihan langsung. Untuk dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati membentuk / menyusun struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang yang terdiri dari :

1. Bupati dan Wakil Bupati

2. Sekretariat Daerah

3. Tiga (3) Asisten Daerah, terdiri dari :

a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi

:

- 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
- 2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- 3) Bagian Administrasi Kemasyarakatan
- 4) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membidangi :

- 1) Bagian Administrasi Pembangunan
- 2) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
- 3) Bagian Administrasi Perekonomian

c. Asisten Administrasi Umum, membidangi :

- 1) Bagian Hukum
- 2) Bagian Organisasi dan Tata Laksana
- 3) Bagian Keuangan
- 4) Bagian Umum

4. Lima (5) Staf Ahli terdiri dari :

- a. Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- b. Bidang Kemasyarakatan dan SDM;
- c. Bidang Pembangunan;
- d. Bidang Pemerintahan; dan
- e. Bidang Hukum dan Politik.

5. Lima Belas (15) Dinas Daerah terdiri dari :
  - a. Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Kebakaran
  - b. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
  - c. Dinas Kelautan Dan Perikanan
  - d. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
  - e. Dinas Kesehatan
  - f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
  - g. Dinas Pekerjaan Umum
  - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah
  - i. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
  - j. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
  - k. Dinas Perhubungan, Informatika Dan Komunikasi
  - l. Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi Dan Mineral
  - m. Dinas Pertanian Dan Peternakan
  - n. Dinas Sosial, Kebudayaan Dan Pariwisata
  - o. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
6. Sepuluh (10) Lembaga Teknis
  - a. Inspektorat Kabupaten
  - b. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
  - c. Badan Kepegawaian Daerah
  - d. Badan Lingkungan Hidup
  - e. Badan Pembudayaan Masy. Dan Pemerintahan Desa
  - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat
  - h. Kantor Ketahanan Pangan
  - i. Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
  - j. Rumah Sakit Umum Lasinrang
7. Lima (5) Lembaga Lain
- a. Kantor Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - b. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan
  - c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal
  - d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
  - e. Sekretariat Korpri
8. Dua Belas (12) Kecamatan, Tiga Puluh Sembilan (39) Kelurahan dan Enam Puluh Sembilan (69) Desa, terdiri dari :
- a. Kecamatan Suppa  
Kelurahan Tellumpanua; Kelurahan Watang Suppa; Desa Lero; Desa Watang Pulu; Desa Tassiwalie; Desa Wiring Tasi; Desa Latong Salo; Desa Ujung Labuang; Desa Polewali.
  - b. Kecamatan Lanrisang  
Kelurahan Lanrisang; Desa Samaulue; Desa Mallongi-longi; Desa Amassangngeng; Desa Barang Palie; Desa Waetuo; Desa Lerang;
  - c. Kecamatan Mattiro Bulu  
Kelurahan Manarang; Kelurahan Padaidi; Desa Pananrang; Desa Padakkalawa; Desa Marannu; Desa Alitta; Desa Padaelo; Desa Bunga; Desa Makkawaru;

d. Kecamatan Watang Sawitto

Kelurahan Maccorowalie; Kelurahan Jaya; Kelurahan Sawitto;  
Kelurahan Sipatokkong; Kelurahan Siparappe; Kelurahan Salo;  
Kelurahan Bentengnge; Kelurahan Penrang.

e. Kecamatan Paleteang

Kelurahan Temmasarangnge; Kelurahan Macinnae; Kelurahan  
Benteng Sawitto; Kelurahan Pacongng; Kelurahan Mamminasae;  
Kelurahan Laleng Bata;

f. Kecamatan Tiroang

Kelurahan Marawi; Kelurahan Tiroang; Kelurahan Pammase;  
Kelurahan Fakkie; Kelurahan Mattiro Deceng;

g. Kecamatan Mattiro Sompe

Kelurahan Langnga; Kelurahan Pallameang; Desa massulowalie; Desa  
mattombong; Desa Mattongang-Tongang; Desa patobong; Desa  
samaenre; Desa mattiro Tasi; Desa siwolong polong.

h. Kecamatan Cempa

Kelurahan Cempa; Desa Tandra Tuo; Desa Mangki; Desa Matunru-  
Tunru; Desa Sikkuale; Desa Tadang Palie; Desa Salipolo;

i. Kecamatan Patampanua

Kelurahan Tonyamang; Kelurahan Teppo; Kelurahan Benteng;  
Kelurahan Maccirinna; Desa leppangang; Desa Malimpung; Desa  
mattiro Ade; Desa Sipatuo; Desa Padang Loang; Desa Pincara;

j. Kecamatan Batu Lappa

Kelurahan Kassa; Desa Batulappa; Desa watang kassa; Desa tapporang; Desa kaseralau.

k. Kecamatan Duampanua

Kelurahan lampa; Kelurahan Pekkabata; Kelurahan Tatae; Kelurahan Data; Kelurahan Bittoeng; Desa kaliang; Desa Paria; Desa Buttu Sawe; Desa Katomparang; Desa Bababinanga; Desa massewae; Desa Maroneng; Desa bungi.

l. Kecamatan Lembang

Kelurahan Benteng, Kelurahan Tadokkong, Desa Binanga karaeng, Desa Rajang, Desa letta, Desa Ulu saddang, Desa Suppirang, Desa Basseang, Desa kariango, Desa Benteng Paremba, Desa pakeng, Desa Lembang Mesakada, Desa Sali-Sali, Desa Sabbang Paru.

9. Perusahaan Daerah

- a. Perusahaan Daerah (PD) Karya.
- b. Perusahaan Daerah Air Minum

**D. Visi Misi Pemerintahan Kabupaten Pinrang**

1. Visi

Terwujudnya masyarakat sejahtera secara dinamis melalui harmonisasi kehidupan, akselerasi, produktivitas kawasan dan revitalisasi peran poros utama pemenuhan pangan nasional.

## 2. Misi

- a) Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter pemudah yang tangguh.
- b) Memperkokoh toleransi, soliditas dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi.
- c) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia termasuk pengutamaan gender.
- d) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparaturnya.
- e) Memantapkan tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
- f) Mengembangkan kerja sama dan integrasi pembangunan.
- g) Meningkatkan fungsional infrastruktur serta jaringan pengairan dan koridor perdagangan komoditas unggulan.
- h) Mengembangkan kawasan andalan dan kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
- i) Menuntaskan penduduk miskin dan perluasan kesempatan kerja melalui pendekatan multi sektor.
- j) Melestarikan lingkungan dan pengelolaan potensi bencana.
- k) Mengembangkan penciptaan masyarakat sejahtera dan derajat kesehatan yang semakin meningkat dan kualitas pendidikan semakin membaik.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang**

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya perbaikan secara terus menerus guna menunjang keberhasilan di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini akan diukur kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2012 – 2014. Berikut hasil analisis rasio keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2012-2014.

##### **1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Oleh karena itu, otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya serta mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang telah ada.

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:



$$R_{K_1} = \frac{P_{pa} + A + D + h(P)}{B + P} \times 100\%$$

Rasio kemandirian daerah Kabupaten Pinrang tahun 2012 adalah sebagai berikut:

$$R_{K_1} = \frac{17.920.619.304,26}{524.099.735.811,47} \times 100\% \\ = 0,034 \text{ atau } 3,4\%$$

Rasio kemandirian daerah Kabupaten Pinrang tahun 2013 adalah sebagai berikut:

$$R_{K_1} = \frac{21.176.935.131,33}{601.677.897.109,92} \times 100\% \\ = 0,035 \text{ atau } 3,5\%$$

Rasio kemandirian daerah Kabupaten Pinrang tahun 2014 adalah sebagai berikut:

$$R_{K_1} = \frac{34.997.091.444,53}{690.672.811.748,18} \times 100\% \\ = 0,050 \text{ atau } 5,0\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui rasio kemandirian daerah Kabupaten Pinrang tahun 2012-2014. Tabel 5.1 menggambarkan hasil perhitungan dan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kabupaten Pinrang.

**Tabel 5.1**  
**Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
2012	3,4%	Instruktif
2103	3,5%	Instruktif
2014	5%	Instruktif

Sumber : Data Diolah (2016)

Dari tabel 5.1 di atas, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian daerah Kabupaten Pinrang tahun 2012 adalah sebesar 3,4%, tahun 2013 sebesar 3,5% dan tahun 2014 sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah pada tahun-tahun tersebut baik dan memiliki hubungan Instruktif, artinya pemerintah daerah masih sangat tergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat.

Selanjutnya hasil perhitungan memperlihatkan bahwa rasio kemandirian daerah Kabupaten Pinrang pada tahun 2012-2014 menunjukkan tren kenaikan. Dalam hal ini kinerja pemerintah daerah cukup baik karena terjadi peningkatan pendapatan asli daerah tiap tahun-tahun tersebut.

## 2. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$II = \frac{P}{T \cdot P \cdot R} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, pengeluaran rutin atau belanja rutin diperoleh dari bagian belanja operasi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan mengenai kelompok belanja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah perhitungan rasio indeks kemampuan rutin daerah Kabupaten Pinrang tahun 2012-2014:

Rasio indeks kemampuan rutin daerah Kabupaten Pinrang tahun 2012 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} II &= \frac{17.920.619.804,26}{420.113.701.099,00} \times 100\% \\ &= 0,0426 \text{ atau } 4,26\% \end{aligned}$$

Rasio indeks kemampuan rutin daerah Kabupaten Pinrang tahun 2013 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} II &= \frac{21.176.935.131,33}{468.987.945.106,00} \times 100\% \\ &= 0.0451 \text{ atau } 4,51\% \end{aligned}$$

Rasio indeks kemampuan rutin daerah Kabupaten Pinrang tahun 2014 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} II &= \frac{37.641.158.766,00}{590.189.923.920,00} \times 100\% \\ &= 0,0637 \text{ atau } 6,37\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui rasio indeks kemampuan rutin daerah Kabupaten Pinrang tahun 2012-2014. Tabel 5.2

menggambarkan hasil perhiungan rasio indeks kemampuan rutin pemerintah Kabupaten Pinrang.

**Tabel 5.2**  
**Hasil Perhitungan Rasio Indeks Kemampuan Rutin Daerah**  
**Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio IKR %</b>	<b>Kemampuan Keuangan Daerah</b>
2012	4,26%	Baik
2013	4,51%	Baik
2014	6,37%	Baik

Sumber : Data Diolah (2016)

Dari tabel 5.2 di atas, dapat diketahui bahwa rasio indeks kemampuan daerah Kabupaten Pinrang tahun 2012 adalah sebesar 4,26%, tahun 2013 sebesar 4,51% dan tahun 2014 sebesar 6,37%. Hal ini menunjukkan bahwa indeks kemampuan rutin daerah tahun-tahun tersebut baik.

Selanjutnya hasil perhitungan memperlihatkan bahwa rasio indeks kemampuan rutin daerah Kabupaten Pinrang pada tahun 2012-2014 menunjukkan tren kenaikan. Dalam hal ini kinerja pemerintah daerah cukup baik karena terjadi peningkatan pendapatan asli daerah tiap tahun-tahun tersebut. Tetapi dalam konteks belanja rutin, kinerja pemerintah daerah kurang baik. Hal ini karena belanja rutin tiap tahun-tahun tersebut mengalami peningkatan.

### 3. Rasio Keserasian

Rasio keserasian yang digunakan dalam analisis ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R \quad B \quad O = \frac{T \quad B \quad O}{T \quad B \quad A}$$

$$R \quad B \quad M = \frac{T \quad B \quad M}{T \quad B \quad A}$$

Rasio keserasian daerah Kabupaten Pinrang tahun 2012 adalah sebagai berikut:

$$R \quad B \quad O = \frac{420.113.701.099,00}{527.100.625.244,75}$$

$$= 0,797 \text{ atau } 7,97\%$$

$$R \quad B \quad M = \frac{92.859.950.409,75}{527.100.625.244,75}$$

$$= 0,176 \text{ atau } 1,76\%$$

Rasio keserasian daerah Kabupaten Pinrang tahun 2013 adalah sebagai berikut:

$$R \quad B \quad O = \frac{468.987.945.106,00}{589.006.556.154,00}$$

$$= 0,796 \text{ atau } 7,96\%$$

$$R \quad B \quad M = \frac{103.502.560.153,00}{589.006.556.154,00}$$

$$= 0,175 \text{ atau } 1,75\%$$

Rasio keserasian daerah Kabupaten Pinrang tahun 2014 adalah sebagai berikut:

$$\frac{R \quad B \quad O}{656.765.137.306,00} = \frac{541.340.247.599,00}{656.765.137.306,00}$$

$$= 0,824 \text{ atau } 8,24\%$$

$$\frac{R \quad B \quad M}{656.765.137.306,00} = \frac{114.219.892.457,00}{656.765.137.306,00}$$

$$= 0,173 \text{ atau } 1,73\%$$

Berikut hasil perhitungan rasio keserasian daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2012-2014:

**Tabel 5.3**  
**Hasil Perhitungan rasio keserasian daerah Pemerintah kabupaten Pinrang Tahun 2012 – 2014**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio Belanja Operasional</b>	<b>Rasio Belanja Modal</b>
2012	79,7%	20,3%
2013	79,6%	20,4%
2014	82,4%	17,8%
<b>Rata-rata</b>	<b>80,5%</b>	<b>19,5%</b>

Sumber : Data Diolah (2016)

Banyaknya manfaat yang diperoleh apabila pelaksanaan belanja pembangunan dapat dilaksanakan secara mandiri ternyata belum mampu dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang. Hal ini terbukti dengan hasil perhitungan rasio keserasian Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2012-2014 yang menunjukkan masih rendahnya rasio belanja pembangunan apabila dibandingkan dengan rasio belanja rutin. Dimana, hasil rata-rata dari rasio belanja pembangunan sebesar 19,50% dan rata-rata rasio belanja rutin sebesar 19,50%, terdapat *gap* sebesar 61%.

Sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 pasal 10 disebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan

yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman Daerah.

Meskipun terdapat banyak sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pasal 10, namun faktanya pemerintah Kabupaten Pinrang yang lebih condong pada ekonomi kerakyatan belum memperhatikan pembangunan daerah, walaupun belanja pembangunan naik meskipun relatif kecil. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah sehingga pemerintah lebih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin yang mengakibatkan belanja pembangunan untuk pemerintah Kabupaten Pinrang kecil atau belum terpenuhi.

#### 4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Dimana:

$P_n$  = Data yang dihitung pada tahun ke-n

$P_0$  = Data yang dihitung pada tahun ke-0

r = Pertumbuhan

Berikut perhitungan rasio pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Pinrang tahun 2012-2014:

**Tabel 5.4**  
**Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Pinrang**  
**Tahun 2012-2014**

Komponen Pertumbuhan	Tahun Anggaran			
	2011	2012	2013	2014
PAD	13.465.906.862,91	17.920.619.304,26	21.176.935.131,33	37.641.158.766,00
<b>Pertumbuhan</b>	-	<b>24,86%</b>	<b>15,38%</b>	<b>43,74%</b>
Total Pendapatan	539.233.386.170,44	555.707.823.565,73	637.684.394.059,15	737.114.981.212,91
<b>Pertumbuhan</b>	-	<b>2,96%</b>	<b>12,86%</b>	<b>13,49%</b>
Belanja Operasi	401.511.119.469,00	420.113.701.099,00	468.987.945.106,00	541.340.247.599,00
<b>Pertumbuhan</b>	-	<b>4,43%</b>	<b>10,42%</b>	<b>13,36</b>
Belanja Modal	101.765.523.496,00	92.859.950.409,75	103.502.560.153,00	114.219.392.457,00
<b>Pertumbuhan</b>	-	<b>0,96%</b>	<b>10,28%</b>	<b>9,38%</b>

Sumber : Data Diolah (2016)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.4 kondisi pertumbuhan APBD Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan bahwa APBD pada tahun anggaran 2012-2014 menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang negatif. Hal ini diakibatkan pertumbuhan nilai PAD dan total pendapatan daerah tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan. Artinya, pemerintah Kabupaten Pinrang belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya yang disebabkan masih fluktuatifnya pertumbuhan belanja pembangunan, dan belanja rutin yang terus bertambah..

Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap



potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian keuangan daerah selama lima tahun terakhir yang menghasilkan jumlah rata-ratanya sebesar 3,97% dengan pola hubungan yang instruktif. Dari hasil tersebut, tergambar dengan jelas masih besarnya ketergantungan pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap sumber-sumber dana bantuan dari pihak ekstern, baik dari pemerintah pusat maupu dari pemerintah provinsi, dengan komponen bantuan terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Penyesuaian.
2. Berdasarkan kemampuan PAD untuk membiayai pengeluaran rutin daerah, yang sering disebut juga dengan Rasio IKR (Indeks Kemampuan Rutin) rata-rata hanya sebesar 5,047% dengan pola kemampuan keuangan yang masih berada dalam interval 00,01% - 20,00% yang dinilai sangat kurang. Artinya, PAD Kabupaten Pinrang belum mampu membiayai belanja rutin.
3. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keserasian, pemerintah Kabupaten Pinrang masih lebih memprioritaskan belanja rutin daripada belanja pembangunan. Hasil rata-rata dari rasio pembangunan sebesar 19,50% dan rasio belanja rutin sebesar 80,50%. Terdapat kesenjangan sebesar 61%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum

memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja rutin dan penghematan pada belanja lainnya.

4. Berdasarkan rasio pertumbuhan (*growth ratio*), PAD Kabupaten Pinrang mengalami pertumbuhan di tiap periode tahun anggaran (2007-2011), Total Pendapatan Daerah juga mengalami pertumbuhan pada tiga tahun terakhir, sama halnya dengan belanja rutin yang juga mengalami pertumbuhan, namun belanja pembangunan mengalami penurunan pada tahun 2014. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi pertumbuhan APBD Kota Makassar menunjukkan rata-rata yang negatif, karena pertumbuhan PAD dan TDP tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan, melainkan diikuti oleh belanja rutin. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012-2014 dinilai sangat rendah, yaitu 8.05%.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang, penulis mencoba mengajukan beberapa saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 sebagai revisi dari UU Nomor 22 tahun 1999, sangat

diperlukan kemandirian keuangan daerah agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh masing-masing daerah.

2. Mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD.
3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh model analisis rasio keuangan sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh.
4. Penelitian ini hanya dilakukan pada tahun anggaran 2012-2014 di Kabupaten Pinrang saja, diharapkan untuk penelitian selanjutnya obyek penelitiannya dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota sehingga terdapat perbandingan antara Kabupaten/Kota yang satu dengan Kabupaten/Kota yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah S. *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah: Perlukah? Atau, Mengapa?* (online) (<http://syukriy.wordpress.com/2008/10/19/sistem-pengendalian-internal-pemerintah-perluakah-atau-mengapa/>), diakses 2012.
- Abdullah S. *Daya Serap Anggaran Rendah Masalah Desentralisasi Fiskal.* (online) (<http://syukriy.wordpress.com/2009/01/21/daya-anggaranrendah-masalah-desentralisasi-fiskal-daerah>), diakses 18 januari 2012.
- Elim J, Safral M. 2009. *Lingkungan Pengendalian*. Jakarta : Pusdiklatwas BPKP.
- Haryanto, Arifuddin, Sahmuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik* Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasmah R. *Menyongsong penerapan SPIP : Menuju tata kelola pemerintah yang lebih baik.* (online) (<http://www.bappenas.go.id/blog/?p=29>), diakses 18 januari 2012.
- Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2009.* 2009. Muna : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang.
- Mamesah, DJ. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* 2006. Jakarta Penerbit CV Tamita Utama.
- Soeseno K. 2009. *Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.* Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Suparmoko M. 2002 *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah.*

Yogyakarta : Penerbit Andi.

Yuwono S, Utomo DC, Zein S, R Azrafiani A. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang :Bayumedia Pulishing.

Widayadi D. 2008. *Abstraksi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah & PeranBPKP*. Makassar : Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

## RIWAYAT HIDUP



**DARMAWAN**, dilahirkan di Desa Buttusawe Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Tepatnya pada Tanggal 05 Juli 1994. Penulis ini adalah anak ke empat dari tujuh bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan Tamrin dengan Patimang.

Mulai memasuki pendidikan formal di SD Negeri 169 Kmp Baru pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Duampanua pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Duampanua dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan studinya ke salah satu perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar dengan memilih Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Akhir Studi penulis mempertahankan Skripsi di hadapan penguji dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang”**